

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH” (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan)

Meita Sekar Sari¹, Suhendar², Rosi Nofitri

^{1,3} Program Studi Akuntansi, Univeristas Mitra Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Radin Inten Lampung

e-mail: Meita@umitra.ac.id

Abstract

Based on calculations and analysis of the work of the Housing and Settlement Service in South Lampung Regency, which was carried out by comparing the plan with the level of realization, it can be indicated that the level of performance achievement of the program that has been made, it appears that the achievement figures are outside the expected plan, thus triggering a performance assessment to be less objective. This will in fact become a problem because it can lead to a low level of performance accountability, where the realization of the performance of activity programs has not been fully implemented or can be interpreted as performance-based budgets and clarity of budget targets is not fully optimal to be accountable. The sample used is saturated sampling. based on the results of observations, it aims to see whether performance-based budgets affect performance accountability in government agencies. Based on the results of the T test $t_{count} 16,839 > t_{table} 1,833$ (attached t table) with the level of Sig. $0,000 < 0,05$. So it can be interpreted that the Performance-Based Budget (X) variable has a significant influence on the Performance Accountability of Government Agencies, and the results of the Determinant R² Test are 0.649 which means the Performance-Based Budget (X) variable has an influence on the Government Agency Performance Accountability variable (Y) of 64.9%. Which means that the Performance-Based Budget has a major effect on the Performance Accountability of Government Agencies at the Housing and Settlement Service of South Lampung Regency.

Keywords : *Performance-Based Budgeting, Clarity of Budget Targets, Government Agencies Performance Accountability*

Abstrak

Berlandaskan perhitungan dan analisis kerja Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatanyang dilakukan dengan cara membandingkan rencana dengan tingkat realisasi, dapat diindikasikan bahwa tingkat capaian kinerja atas program yang telah dibuat, terlihat bahwa perolehan angka capaian berada di luar rencana yang diharapkan, sehingga memicu penilaian kinerja menjadi kurang objektif. Hal ini justru akan menjadi masalah karena bisa menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, dimana realisasi kinerja program kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau bisa diartikan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran belum sepenuhnya optimal untuk dapat dipertanggungjawabkan. sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. berdasarkan hasil observasi bertujuan untuk melihat apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil Uji T $t_{hitung} 16,839 > t_{tabel} 1,833$ (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat Sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan didapatkan hasil Uji Determinan R² sebesar 0,649 yang berarti variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 64,9 %. Yang berartikan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

Kata Kunci : *Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Target Anggaran, Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja*

1. PENDAHULUAN

Era reformasi keuangan daerah, tata buku atau tata usaha keuangan daerah tidak lagi memadai untuk dijadikan sebagai penghasilan informasi yang di kehendaki oleh PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang telah diperbarui dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003. Menurut peraturan perundangan terbaru yang dimaksud tersebut, tugas pengelolaan keuangan daerah ialah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan dan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal otonomi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti disebutkan diatas didanai dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sehubungan pada saat ini bahwa sistem pengelolaan keuangan negara telah menempuh tahap yang baru yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini untuk diimplementasikan secara utuh dalam rangka transparansi dan mewujudkan *good governance*.

Menurut Bahri (2012) anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintahan terkait sebagai fungsi pemberi layanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintahan daerah . melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akutabilitas public (Bahri,2012).

Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan memiliki program Kinerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan taraf hidup setiap masyarakat di beberapa daerah yang tingkat perekonomian masih rendah. Program pembangunan tersebut tak hanya difokuskan pada satu daerah semata melainkan di fokuskan pada semua wilayah Republik Indonesia sebagai wujud pemerataan pembangunan pada setiap daerah.

Tabel 1.1 Anggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp. 22.500.090.572.000	Rp. 17.500.570.020.000
2019	Rp. 20.400.520.080.000	Rp. 15.210.900.050.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya anggaran pada tahun 2018 sebagai anggaran tertinggi selama 2 (dua) tahun terakhir yang diberikan oleh pemerintah, sebesar Rp. 22.500.090.572.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.500.570.020.000 sedangkan ditahun 2019 anggaran sebesar Rp. 20.400.520.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.210.900.050.000, yang mengartikan bahwasanya ada penurunan realisasi anggaran pada tahun 2019. Maka kesimpulan yang diperoleh dari tabel 1.1. diatas bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lampung Selatan dalam membiayai program mengalami fluktuasi atau ketidak stabilan target anggaran dan realisasi pada tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara target anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2018 sampai dengan 2019. Sehingga akibat dari fluktuasi anggaran tersebut, berdampak pada penyerapan anggaran yang belum optimal atau tidak mencapai target 100%.

Berlandaskan perhitungan dan analisis kerja Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana dengan tingkat realisasi, dapat diindikasikan bahwa tingkat capaian kinerja atas program yang telah dibuat, terlihat bahwa perolehan angka capaian berada di luar rencana yang diharapkan, sehingga memicu penilaian kinerja menjadi kurang objektif. Hal ini justru akan menjadi masalah karena bisa menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, dimana realisasi kinerja program kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau bisa diartikan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran belum sepenuhnya optimal untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul : **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH” (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan).**

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan dapat dihitung. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subyek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologi nya. (Sugiyono, 2017:48).

Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu informasi dari responden/narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian (Wardiyanta dalam Eko Sugiarto 2015:87). Dalam penelitian ini, data yang di peroleh berdasarkan kuesioner dan wawancara.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Sedangkan menurut Sugiyono (2013) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

**Tabel 3.2 Data pengurus program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Pelaksana Anggaran dan Pelaporan Kinerja	Pegawai
Kepala Dinas	1
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)	1
Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	5
Korpas dan TFL	5
Jumlah	12Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Selatan

Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yakni Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Sugiyono (2010) Jadi Sampel yang digunakan menggunakan 12 orang pegawai bagian pengurus BSPS Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan.

Uji Regresi Linier Sederhana

Menurut Anwar Sanusi (2016:131) regresi sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Adapun rumus Uji regresi Linier Sederhana :

$$Y = a + b X + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X : Anggaran Berbasis Kinerja

a : Titik potong Y atau Konstanta

b : Nilai faktor kemiringan atau slope atau perubahan rata-rata dalam y untuk setiap perubahan.

e : Standar Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap jawaban 12 orang responden dengan hasil *output* seperti dapat dilihat pada tabel 4.4 sampai dengan 4.5, angka ini merupakan nilai korelasi antara tiap item dengan skor total item. Untuk menentukan suatu item kuesioner

valid dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Ghozali 2015) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Output Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Kondisi	Simpulan
Item 1	0,767	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 2	0,899	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 3	0,618	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 4	0,739	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 5	0,899	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 6	0,899	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 7	0,767	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 8	0,912	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 9	0,708	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 10	0,708	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 11	0,735	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Item 12	0,834	0,532	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : data diolah tahun 2020 menggunakan sofwer SPSS

Berdasarkan uji validitas diatas pada variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja dapat disimpulkan bahwa pengujian 12 item pernyataan yang diuji coba terhadap 12orang responden dimana bernilai $r_{hitung} > r_{tabel} 0,532$ (terlampir) jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja adalah valid.

Tabel 4.2
Hasil Output Uji Validitas Akuntabilitas Berbasis Kinerja(Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Kondisi	Simpulan
Item 1	0,788	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 2	0,719	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 3	0,590	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 4	0,788	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 5	0,755	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 6	0,788	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 7	0,969	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid
Item 8	0,969	0,532	$r_{hitung} > r_{table}$	Valid

Sumber: data diolah tahun 2020 menggunakan sofwer SPSS

Berdasarkan uji validitas diatas pada variabel (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disimpulkan bahwa pengujian pada 8 item pernyataan yang diuji coba terhadap 12 orang responden dimana bernilai $r_{hitung} > r_{tabel} 0,532$ (terlampir) jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Reliabilitas :

- Jika nilai Cronbachalpha $> 0,60$, maka pernyataan reliabel.
- Jika nilai Cronbachalpha $< 0,60$, maka pernyataan tidak reliabel

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2015) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria alpha sebagai berikut :

- 0,80 – 1,0 : Reliabilitas Baik
- 0,60 – 0,79 : Reliabilitas Diterima
- < 0,60 : Reliabilitas Buruk

Tabel 4.3
Hasil Ouput Uji Reliabilitas Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.830	12

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan *output* uji reliabilitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Variabel Anggaran Berbasis Kinerja bernilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,830>0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada Variabel Bebas (X) Anggaran Berbasis Kinerja telah reliabel dan dapat diterima.

Tabel 4.4
Hasil Ouput Realiabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.887	8

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan *output* uji reliabilitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bernilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,887>0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada Variabel Terikat (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah reliabel dan dapat diterima.

3. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.5
Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.373	10.335		1.875	.997
	Anggaran Berbasis Kinerja	.995	.132	.956	16.839	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: data diolah tahun 2020

Persamaan dari hasil tersebut, didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 19,373 + 0,995 X + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X : Anggaran Berbasis Kinerja

a : titik potong Y atau Konstanta

b : nilai faktor kemiringan atau slope atau perubahan rata-rata dalam y untuk setiap perubahan.

e : Standar eror

Dari unit persamaan diatas, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta a sebesar 19,373. Hal ini menunjukkan arti bahwa nilai konsistensi variable anggaran berbasis kinerja adalah 19,373.
2. Nilai B berasal dari koefisien variable x dimana berdasarkan tabel diatas sebesar 0,995 diartikan bahwa setiap penambahan 1% nilai anggaran berbasis kinerja maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertambah sebesar 0,995.
3. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga didapatkan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y bernilai positif.

4. Uji T

Untuk menguji pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh atau tidak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar pengambilan keputusan

- a. Jika nilai sig < 0,05, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
- b. Jika nilai sig > 0,05 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Tabel 4.6
Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.373	10.335		1.875	.997
	Anggaran Berbasis Kinerja	.995	.132	.956	16.839	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil Uji T pada tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - a. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh t_{hitung} variabel Anggaran Berbasis (X) sebesar 16,839 dengan nilai Sig sebesar 0,000
 - b. Dengan demikian berarti t_{hitung} 16,839 > t_{tabel} 1,833 (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat Sig. 0,000 < 0,05.
 - c. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

5. Uji Koefisien Determinasi R²

Uji Koefisien Determinasi R² yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi atau R² ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap (Y).

Tabel 4.7
Uji Determinan R²

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.674 ^a	.649	.646	.674	2.331
a. Predictors: (Constant), anggaran berbasis kinerja					
b. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan output dari hasil uji R² pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut : R Square : R² sebesar 0,649 yang berarti variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 64,9 %. Yang berarti Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

2. Analisis Masalah dan Pemecahannya

1. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis penulis, di Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan didapatkan bahwasanya memiliki program Kinerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan taraf hidup setiap masyarakat terutama pada daerah kabupaten Lampung Selatan yang tingkat perekonomian masih rendah atau rumah yang belum layak huni. Program ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, dan utilitasnya. Program tersebut menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Lampung Selatan dalam membiayai program mengalami fluktuasi atau ketidak stabilan target anggaran dan realisasi pada tiap tahunnya. Berdasarkan dari hasil penyebaran angket yang dilakukan, hal ini mendukung dari data yang diolah dengan menggunakan uji T yang menghasilkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 16,839 > t_{tabel} 1,833 (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat Sig. < α (0,000 < 0,05).

2. Pemecahan Masalah

Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Menurut PP No.21 tahun 2004 pasal 7 ayat 1). Sedangkan Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:21) Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Sejalan dengan teori tersebut yang terjadi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan masih belum didapatkan efisiensi dalam kinerja pegawai dikarenakan adanya fluktuasi anggaran ditahun 2018 lebih besar dibanding tahun 2019. Berdasarkan permasalahan dalam anggaran berbasis kinerja berlandaskan dengan perhitungan dan analisis kerja Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan dapat diindikasikan bahwa tingkat pencapaian kinerja atas program yang telah dibuat belum mencapai angka yang dianggarkan disetiap tahunnya pada tahun 2018 dan 2019.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil observasi bertujuan untuk melihat apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil Uji T $t_{hitung} 16,839 > t_{tabel} 1,833$ (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat Sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan didapatkan hasil Uji Determinan R^2 sebesar 0,649 yang berarti variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 64,9 %. Yang berartikan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil Observasi dan Kesimpulan penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Selalu meningkatkan kinerja pegawai, agenda inovasi-inovasi, serta meningkatkan target dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni.
2. Bagi penulis selanjutnya, hendaknya perlu dilakukan pengkajian dengan cara memperdalam atau mengembangkan variabel penelitian. Sehingga dapat diperoleh temuan lainya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggraini. “*Anggaran Bisnis: Analisis Perencanaan dan Pengendalian Laba*”. Edisi Kedua”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Anggaraini, Yunita, B. Hendra Puranto. “*Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD secara Komprehensif*”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Bastian, Indra. 2010. “*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*”. Yogyakarta: Erlangga
- Endrayani, Komang Sri dkk. 2014. “*Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)*”. dalam e-Journal S1 Akuntansi Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Silvia, Dewi. 2021. “*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung*”. dalam Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya. 2021